

**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM
PENGELOLAAN SAMPAH MELALUI PROGRAM JEMBRANA KEDAS
DI KABUPATEN JEMBRANA PROVINSI BALI**

Ngurah Treisna Adi Suputra

NPP. 32.0604

Asdaf Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali

Program Studi Studi Kebijakan Publik

Email: 32.0604@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Dr. Drs. Andi Masrich, M.Si.

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): BPS data shows that Bali is one of the largest foreign tourist destinations in Indonesia, so waste is a crucial issue in Bali because it is directly proportional to the number of tourists traveling in Bali. As part of a province that is visited by many tourists, Jembrana experiences an increase in waste generation every year. This problem is exacerbated by the availability of landfill which is only 1 location in Jembrana Regency, this will certainly cause piles of waste that have a negative impact on the lives of Balinese people, especially the people of Jembrana Regency. Departing from this problem requires collaborative steps between the government and the community and the private sector in solving this problem. **Purpose:** This study aims to determine the implementation of collaborative governance in waste management through the Jembrana Kedas program in Jembrana Regency, Bali Province. **Method:** In this study the authors used a descriptive qualitative approach, this approach was chosen because the qualitative model provides full freedom for researchers to change the direction of research in the middle of activities in order to achieve the main objectives of the study, the descriptive method was chosen to describe the results of the study in depth and detail. Data collection techniques include interviews, observation, and documentation as well as data triangulation. The main theory used to analyze this topic is the collaborative governance theory by Ansell and Gash in 2008. There were 10 informants involved in this research. Data analysis was carried out through data reduction, data presentation and also conclusion drawing and verification. The instrument of this research is the author himself. **Result:** The results of research related to Collaborative Governance in Waste Management through the Jembrana Kedas Program in Jembrana Regency, Bali Province show that in the initial condition dimension it states that the concept of collaboration has begun to be developed since 2021 with regard to the increasing volume of waste in Jembrana Regency, in the institutional design dimension there is certainty of tasks and management structures, in the facilitative leadership dimension it can be seen that the regional head of Jembrana Regency fully supports the collaboration program and also empowers the local community, in the dimension of the collaboration process it has been seen that there is collaboration between the community, the private sector and the government even though the intensity is not optimal. **Conclusion:** Collaborative governance in waste management through the Jembrana Kedas Program between the government, KSMS, the community, and the private sector has been running quite well, indicated by the role and cooperation between actors since the early stages of program implementation.

Keywords: collaborative governance, waste management, Jembrana Kedas

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Data BPS menunjukkan bahwa Bali merupakan salah satu destinasi wisatawan asing terbesar di Indonesia, sehingga sampah menjadi isu yang krusial di Bali karena berbanding lurus dengan banyaknya jumlah turis yang berwisata di Bali. Sebagai bagian dari provinsi yang banyak dikunjungi oleh wisatawan, Jembrana mengalami peningkatan timbunan sampah setiap tahunnya. Permasalahan ini diperkeruh dengan ketersediaan TPA yang hanya terdapat 1 lokasi di Kabupaten Jembrana, hal ini tentu akan menimbulkan tumpukan sampah yang berdampak negatif bagi kehidupan masyarakat Bali, khususnya masyarakat Kabupaten Jembrana. Berangkat dari permasalahan ini dibutuhkan langkah kolaborasi antara pemerintah dan pihak masyarakat serta pihak swasta dalam penyelesaian masalah ini. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah melalui program Jembrana Kedas di Kabupaten Jembrana Provinsi Bali **Metode:** Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, pendekatan ini dipilih karena model kualitatif memberikan keleluasaan penuh bagi peneliti untuk mengubah arah penelitian ditengah kegiatan demi tercapainya tujuan utama penelitian, metode deskriptif dipilih untuk memaparkan hasil penelitian secara mendalam dan rinci. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi serta triangulasi data. Teori utama yang dipakai untuk menganalisis topik ini adalah Teori *collaborative governance* oleh ansell dan gash tahun 2008. Informan yang dilibatkan dalam penelitian ini berjumlah 10 informan. Analisis data dilaksanakan melalui reduksi data, penyajian data dan juga penarikan kesimpulan dan verifikasi. Instrument penelitian ini adalah penulis sendiri. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian terkait dengan Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah Melalui Program Jembrana Kedas Di Kabupaten Jembrana Provinsi Bali menunjukkan bahwa pada dimensi kondisi awal menyatakan bahwa konsep kolaborasi sudah mulai dikembangkan sejak tahun 2021 berkenaan dengan mulai meningkatnya volume sampah di Kabupaten Jembrana, pada dimensi desain kelembagaan sudah terdapat kepastian tugas dan struktur kepengurusan, pada dimensi kepemimpinan fasilitatif terlihat bahwa kepala daerah kabupaten Jembrana mendukung secara penuh program kolaborasi dan juga memberdayakan Masyarakat setempat, pada dimensi proses kolaborasi sudah terlihat adanya kolaborasi antara Masyarakat, pihak swasta dan pemerintah meskipun intensitasnya belum optimal. **Kesimpulan:** Collaborative governance dalam pengelolaan sampah melalui Program Jembrana Kedas antara pemerintah, KSM, masyarakat, dan sektor swasta telah berjalan cukup baik, ditunjukkan melalui adanya peran dan kerja sama lintas aktor sejak tahap awal pelaksanaan program.

Kata Kunci: kolaborasi pemerintahan, pengelolaan sampah, Jembrana Kedas

I. PENDAHULUAN

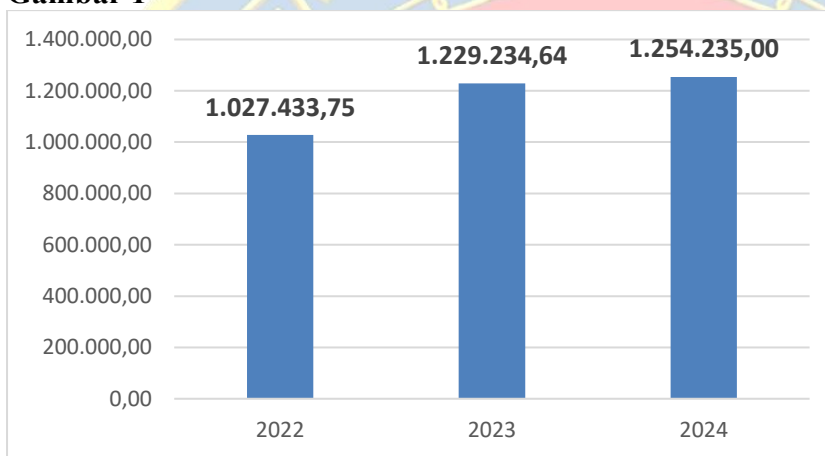
1.1 Latar Belakang

Pemerintah mengakui sampah sebagai permasalahan lingkungan hidup yang krusial, sehingga pemerintah wajib menyediakan pelayanan publik dalam pengelolaannya (Khairi, 2022). Pengelolaan sampah oleh pemerintah daerah dilakukan sebagai upaya melindungi kesehatan masyarakat dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah menjelaskan bahwa sampah ialah bagian tidak terpakai dari aktivitas manusia ataupun alami yang berbentuk padat (Riksfardini, 2023). Dilansir dari laman resmi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2025), permasalahan sampah di Indonesia merupakan isu serius yang harus ditangani secara sistematis dan berkelanjutan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 disebutkan bahwa pengelolaan sampah harus mencakup kegiatan pengurangan sampah dari sumbernya, seperti sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Hal ini untuk menguatkan proses manajemen regional (Insyori, 2024). Walaupun regulasi yang mendukung sudah ada, permasalahan sampah masih menjadi tantangan besar di banyak wilayah Indonesia. Hal ini untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat (Jamaruddin & Sudirman, 2022).

Rendahnya tingkat pengelolaan sampah di Indonesia disebabkan karena sebagian besar masih menggunakan pendekatan linear, di mana proses pengelolaan hanya terdiri dari pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan akhir (Soeharsono et al., 2023). Dilansir dari Badan Pusat Statistika (2024) menunjukkan bahwa Bali merupakan salah satu destinasi wisatawan asing terbesar di Indonesia yaitu 6.333.360 kunjungan pada tahun 2024. Sehingga sampah menjadi isu yang krusial di Bali. Menurut data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK, 2024), sampah yang dihasilkan pulau ini mencapai 3.600 ton/hari pada tahun 2024.

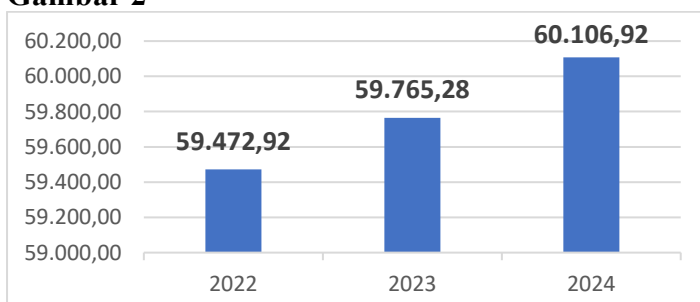
Gambar 1



Sumber : SIPSN LHK (2025)

Timbulan sampah yang dihasilkan Provinsi Bali selama 3 tahun (2022-2024). pada gambar, timbulan sampah di Bali mengalami tren kenaikan dari tahun ke tahun (Çetin & Demirci, 2024). Pada tahun 2022, jumlah timbulan sampah tercatat sebesar 1.027.433,75 ton, meningkat menjadi 1.229.234,64 ton pada tahun 2023, dan kembali naik menjadi 1.254.235,00 ton pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan tekanan yang semakin besar terhadap sistem pengelolaan sampah yang ada. Peningkatan timbulan sampah di Provinsi Bali sejalan dengan kondisi di masing-masing kabupaten/kota yang dimana memiliki andil dalam permasalahan sampah (Pandit et al., 2024). Salah satu kabupaten yang ikut andil dalam permasalahan sampah di Provinsi bali ialah Kabupaten Jembrana. Sebagai bagian dari provinsi yang banyak dikunjungi oleh wisatawan, jembrana mengalami peningkatan timbulan sampah setiap tahunnya.

Gambar 2



Sumber : SIPSN LHK (2025)

Terlihat bahwa timbunan sampah di Kabupaten Jembrana terus meningkat. Pada tahun 2022, timbunan sampah tercatat sebesar 59.472,92 ton, kemudian meningkat menjadi 59.765,28 ton pada tahun 2023, dan mencapai 60.106,92 ton pada tahun 2024. Berdasarkan gambar diatas tahun 2018, indeks SPBE berada di angka 1,98, meningkat menjadi 2,18 di tahun 2019, 2,26 di tahun 2020, dan terus berkembang hingga mencapai nilai rata-rata 2,79 pada tahun 2023. Komposisi sampah di Kabupaten Jembrana tahun 2023 didominasi oleh dua jenis utama, yaitu sampah organik berupa kayu-ranting sebesar 47,84% dan sisa makanan sebesar 27,37%. Disusul oleh sampah plastik sebanyak 19,04%, sedangkan jenis sampah lainnya seperti logam, kertas karton, kaca, kain, karet-kulit, dan lainnya memiliki persentase yang jauh lebih kecil, masing-masing kurang dari 4%.

Menurut data agregat kependudukan Dinas Dukcapil Kabupaten Jembrana jumlah penduduk pada tahun 2024 mencapai 329.353 ribu jiwa. Sebagai daerah penghubung antar kota dan tempat transit di Bali, sangat disayangkan bahwa kenyataannya Kabupaten Jembrana hanya memiliki satu TPA, yaitu TPA Peh di Kecamatan Negara, yang kondisinya telah overload. Kodisi tersebut dipaparkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 1

Tahun	Volume Sampah Masuk Landfill (Ton/Tahun)	Luas Landfill Aktif TPA (m²)	Estimasi Volume Sampah (m³)
2022	8.499	7.300	16.998
2023	8.913	7.300	17.826
2024	10.096	7.300	18.332,63

Sumber : diolah oleh peneliti, 2025

TPA Peh di Kabupaten Jembrana mengalami kondisi overload seiring meningkatnya jumlah timbunan sampah yang masuk ke landfill setiap tahunnya. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Jembrana, volume sampah yang masuk pada tahun 2022 tercatat sebesar 8.499 ton, meningkat menjadi 8.913 ton pada 2023, dan mencapai 10.096 ton pada 2024. Seluruh sampah ini ditampung di area landfill aktif seluas hanya 7.300 m², sehingga kapasitas tampung fisik kian terbatas.

Pemerintah Kabupaten Jembrana menjalin kerja sama dengan PT Systemiq Lestari Indonesia pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 melalui proyek bernama STOP (*Stopping Tap on Ocean Plastic*), yang awalnya berfokus pada pengurangan sampah plastik yang berpotensi mencemari lautan melalui pengelolaan sampah berbasis komunitas dan teknologi daur ulang yang efektif. Program Jembrana Kedas merupakan turunan dari proyek STOP dan menjadi upaya strategis Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam menerapkan sistem ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah. "Jembrana Kedas" sendiri berasal dari bahasa Bali yang berarti 'bersih', sekaligus merupakan akronim dari "Keren Tanpa Ada Sampah". Pada tahap awal, program ini didukung oleh kerja sama dengan PT Systemiq (melalui PT. Systemic Lestari Indonesia) yang berfokus pada pengurangan polusi plastik laut.

Pengelolaan program Jembrana Kedas sepenuhnya dilanjutkan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Jagra Palemahan. KSM mengambil alih peran penting dalam mendorong keterlibatan masyarakat, mulai dari pemilahan sampah di tingkat rumah tangga hingga proses pengangkutan, pengolahan, dan pemanfaatan sampah secara optimal. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan bahwa urgensi penelitian yang akan dilakukan didasarkan pada meningkatnya jumlah timbunan sampah di Kabupaten Jembrana dan daya

tampung TPA Peh yang seringkali mengalami overload. Tentunya dibutuhkan kerjasama berbagai pihak untuk mengatasi masalah tersebut (Handayani et al., 2023).

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Meskipun collaborative governance telah banyak diteliti dalam berbagai konteks, masih terdapat kesenjangan dalam pemahaman tentang bagaimana model ini diterapkan dan berfungsi dalam konteks spesifik pengelolaan sampah di daerah seperti Kabupaten Jembrana. Penelitian ini dapat mengeksplorasi bagaimana faktor-faktor lokal seperti budaya Bali, struktur pemerintahan daerah, dan karakteristik masyarakat setempat mempengaruhi implementasi dan keberhasilan collaborative governance dalam Program Jembrana Kedas. Analisis mendalam tentang tantangan dan peluang yang muncul dalam proses kolaborasi antar pemangku kepentingan di tingkat lokal dapat memberikan wawasan baru tentang adaptasi dan optimalisasi model collaborative governance dalam pengelolaan sampah di daerah (Aragaw, 2025).

Sementara banyak studi berfokus pada tahap awal implementasi program collaborative governance, masih ada kekurangan penelitian yang menganalisis keberlanjutan jangka panjang dan potensi skalabilitas dari inisiatif semacam ini (Ebnou Abdem et al., 2024). Penelitian Anda dapat mengisi kesenjangan ini dengan menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan Program Jembrana Kedas, termasuk mekanisme pendanaan, transfer pengetahuan, dan adaptasi terhadap perubahan kondisi sosial-ekonomi. Selain itu, studi ini dapat mengeksplorasi potensi dan tantangan dalam memperluas program ini ke daerah lain di Bali atau bahkan di luar provinsi, memberikan wawasan berharga tentang bagaimana model collaborative governance dalam pengelolaan sampah dapat disesuaikan dan ditingkatkan skalanya di berbagai konteks geografis dan administratif.

Meskipun collaborative governance telah terbukti efektif dalam mengatasi masalah kompleks seperti pengelolaan sampah, masih ada kesenjangan dalam pemahaman tentang bagaimana inovasi teknologi dapat diintegrasikan ke dalam model ini untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Penelitian Anda dapat mengeksplorasi bagaimana Program Jembrana Kedas memanfaatkan atau dapat memanfaatkan teknologi dalam proses kolaborasi, pengumpulan data, pemantauan, dan pengelolaan sampah. Analisis tentang peran teknologi dalam memfasilitasi komunikasi antar pemangku kepentingan, meningkatkan transparansi, dan mendorong partisipasi masyarakat dapat memberikan perspektif baru tentang evolusi collaborative governance di era digital (Gilman, 2017). Studi ini juga dapat menyelidiki tantangan dan peluang dalam mengadopsi solusi teknologi dalam konteks lokal, serta implikasinya terhadap kebijakan dan praktik pengelolaan sampah di masa depan.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari hasil penelitian terdahulu yang sekiranya memiliki perspektif yang sama. Adapun pertama adalah penelitian karya Niluh Eka Putri Setiwandari tahun 2023 berjudul Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah dengan hasil menunjukkan bahwa tata kelola kolaboratif yang diterapkan pada lokus sudah berjalan cukup optimal dibuktikan dengan berkurangnya timbunan sampah dan berkurangnya tempat pembuangan sampah liar dan memperpanjang umur TPA (Eka et al., 2023). Penelitian oleh Cipta Insan Setanggi Pekasi, Engkus, dan Sakrim Miharja pada tahun 2022 Collaborative Governance Dalam Program Kang Pisman (Kurangi, Pisahkan, Dan Manfaatkan) Untuk Mengatasi Permasalahan Sampah Di Kota Bandung dengan hasil bahwa proses kolaborasi antara berbagai pihak sudah berjalan dengan cukup baik, namun masih diperlukan evaluasi dan peningkatan program Kang Pisman (Pekasih et al., 2022). Penelitian karya Hidayat Chusnul Chotimah, Muhammad Ridha Iswardhana, dan Lucitania Rizky pada tahun 2021 yang berjudul Model Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah Plastik Laut Guna Mewujudkan

Ketahanan Lingkungan Maritim Di Kepulauan Seribu dengan hasil bahwa telah terjadi kolaborasi antar pemerintah, masyarakat, dan swasta walaupun belum terlaksana secara maksimal (Chotimah et al., 2022). Penelitian karya Ni Komang Erika Depi Permatasari, I Wayan Sugiartana, dan I Komang Trisna Eka Putra pada tahun 2022 yang berjudul Efektivitas Program Bank Sampah Sebagai Upaya Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah Bali Bersih dengan hasil penelitian bahwa bank sampah belum berjalan secara efektif dan partisipasi masyarakat masih minim (Permatasari et al., 2022). Penelitian karya Nanik Eprianti, Neng Himayasari, Ilham Mujahid, dan Popon S pada tahun 2021 berjudul Analisis Implementasi 3R Pada Pengelolaan Sampah (Studi Kasus: Program 3R di Desa Jatihandap, Kelurahan Jatihandap, Kota Bandung) dengan hasil pembuktian bahwa ilmu pengetahuan serta wawasan masyarakat yang meningkat tentu berbanding lurus dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sampah yang baik (Eprianti et al., 2021).

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Kebaruan penelitian ini terletak pada eksplorasi mendalam terhadap implementasi konsep *collaborative governance* dalam konteks spesifik Program Jembrana Kedas di Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. Meskipun *collaborative governance* telah banyak diteliti, studi ini menawarkan perspektif baru dengan menyelidiki bagaimana inovasi lokal dalam pengelolaan sampah dapat diintegrasikan secara efektif ke dalam kerangka kolaboratif. Program Jembrana Kedas, sebagai inisiatif unik yang menggabungkan kearifan lokal dengan pendekatan modern dalam pengelolaan sampah, menyajikan laboratorium hidup untuk menganalisis dinamika kolaborasi antar pemangku kepentingan di tingkat daerah. Penelitian ini tidak hanya mengungkap mekanisme operasional dari program inovatif tersebut, tetapi juga meneliti bagaimana nilai-nilai budaya Bali dan karakteristik sosial-ekonomi lokal mempengaruhi dan membentuk proses kolaborasi. Dengan demikian, studi ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman tentang adaptasi dan implementasi *collaborative governance* dalam konteks pengelolaan lingkungan di tingkat lokal. Penelitian yang dilakukan penulis memiliki pandangan yang lebih segar dari penelitian sebelumnya dengan menggunakan landasan teori yang lebih baru dan lebih sesuai dengan zaman digital, penelitian terdahulu cenderung menggunakan konsep teori yang lebih tua (Chotimah et al., 2022). Selain itu kebaruan penelitian ini juga berasal dari kebaruan data timbulan sampah yang terbaru di Kabupaten Jembrana hal ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menggunakan data yang sudah lama (Permatasari et al., 2022).

1.5 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah melalui program Jembrana Kedas di Kabupaten Jembrana Provinsi Bali

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi pelaksanaan *collaborative governance* dalam penanganan sampah melalui program Jembrana Kedas.

Pendekatan ini dipilih karena memiliki karakteristik yang fleksibel dan alami sehingga pendekatan ini relevan dengan topik penelitian ini (Sugiyono, 2023). Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori collaborative governance oleh Ansell dan Gash (2008). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui proses observasi lapangan, studi dokumen dan juga wawancara terhadap informan yang telah ditentukan. Pemilihan informan dalam penelitian ini didasarkan pada subjek yang terlibat dalam proses kolaborasi penanganan sampah di Kabupaten Jember baik dari internal dinas Lingkungan Hidup, Masyarakat, dan pihak ketiga, Adapun informan yang dipakai sejumlah 10 informan. Adapun informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember, informan kunci merupakan informan yang memiliki pengetahuan luas dan mendalam atas sebuah topik yang memang menjadi keahliannya (Simangunsong, 2017). Teknik analisis data pada penelitian ini dilaksanakan melalui 3 tahapan yaitu reduksi data yang berserak di lapangan, penyajian data dalam bentuk narasi dan tabel maupun gambar, dan juga penarikan Kesimpulan dan verifikasi. Adapun penelitian ini berlangsung selama 19 hari di bulan Januari 2025 berlokasi di lingkup Kabupaten Jember, terutama di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan menggunakan analisis melalui Teori kolaborasi dari (Ansell & Gash, 2008) yang meliputi beberapa dimensi yaitu, kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaborasi dan dijabarkan sebagai berikut :

3.1 Kondisi Awal

Ketidakseimbangan Kekuasaan dan Sumber Daya. Pada fase awal, PT Systemiq memegang peran dominan sebagai mitra pemerintah dalam pengelolaan TPST, menyediakan dukungan finansial, teknis, dan pelatihan kepada KSM Jagra Palemahan. Dukungan ini membuat pelaksanaan pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah berjalan. Setelah berakhirnya kerjasama (PKS Nomor 415.4/17/PKS/PEM/2022), tanggung jawab pengelolaan sepenuhnya dialihkan ke KSM dengan sumber daya yang jauh lebih. Pihak KSM kini harus bekerja lebih keras mengelola TPST tanpa pendampingan langsung, sedangkan pemerintah daerah menghadapi keterbatasan anggaran. Ketidakseimbangan awal ini menandakan risiko dominasi dan manipulasi kolaborasi oleh pihak yang lebih kuat (Ansell & Gash, 2008).

Pada mulanya dalam kolaborasi pengelolaan sampah melalui Program Jember Keda melibatkan pelbagai aktor yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember, PT. Systemiq, KSM Jagra Palemahan, dan Masyarakat. Sebelum adanya kerjasama melalui Program Jember Keda di TPA Peh sistem pengelolaannya menggunakan sistem yang sama dengan TPA pada umumnya, yaitu menggunakan sistem *open dumping*. Namun, semenjak tahun 2019 sistem pengelolaannya berubah menjadi *controlled landfill* dan sekaligus dibangunnya TPST dan pelaksanaan Program Jember Keda.

Pada awalnya, pengelolaan sampah di Kabupaten Jember menghadapi tantangan serius akibat sistem *open dumping* yang tidak berkelanjutan. Menurut data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember, sebelum tahun 2019, TPA Peh menerima sekitar 150 ton sampah per hari, dengan 70% di antaranya adalah sampah organik yang berpotensi diolah. Namun, karena keterbatasan infrastruktur dan sistem pengelolaan, hampir seluruh sampah tersebut hanya ditimbun tanpa pengolahan lebih lanjut. Hal ini tidak hanya menyebabkan masalah lingkungan seperti pencemaran air tanah dan udara, tetapi juga mempersingkat usia pakai TPA. Studi lingkungan yang dilakukan pada tahun 2018 menunjukkan bahwa jika praktik ini terus berlanjut, TPA Peh diperkirakan akan mencapai kapasitas maksimumnya dalam waktu kurang dari 5 tahun.

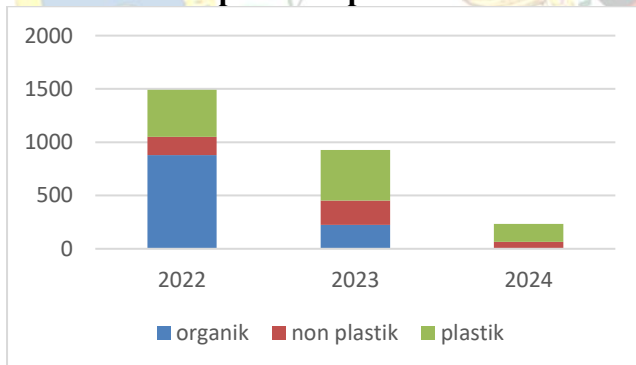
Merespon situasi kritis tersebut, pada tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Jember menginisiasi Program Jember Keda melalui kolaborasi multi-stakeholder yang inovatif. Program ini melibatkan Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Jembrana sebagai koordinator utama, PT. Systemiq yang menyediakan keahlian teknis dan manajemen proyek, KSM Jagra Palemahan yang berperan dalam mobilisasi masyarakat, serta partisipasi aktif dari masyarakat setempat. Langkah pertama yang diambil adalah transformasi sistem pengelolaan di TPA Peh dari open dumping menjadi controlled landfill. Investasi sebesar Rp 5 miliar dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur baru, termasuk sistem drainase yang lebih baik, fasilitas pengomposan, dan unit pemilahan sampah. Data dari Dinas Lingkungan Hidup menunjukkan bahwa dalam enam bulan pertama implementasi, volume sampah yang masuk ke landfill berkurang hingga 30%, sementara tingkat daur ulang meningkat dari hampir nol menjadi 25%.

Seiring dengan perubahan sistem di TPA, Program Jembrana Kedas juga memfokuskan pada pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di berbagai lokasi strategis. Menurut laporan perkembangan program tahun 2020, telah dibangun 5 unit TPST dengan kapasitas total pengolahan 50 ton sampah per hari. TPST ini tidak hanya berfungsi sebagai pusat pemilahan dan pengolahan sampah, tetapi juga sebagai pusat edukasi masyarakat tentang pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Program ini juga melibatkan pelatihan intensif bagi lebih dari 200 petugas kebersihan dan relawan masyarakat dalam teknik pemilahan sampah dan pengomposan. Hasilnya, pada akhir tahun 2020, tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah di sumber meningkat dari 10% menjadi 45%, dan produksi kompos dari sampah organik mencapai 10 ton per bulan. Lebih lanjut, survei kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh PT. Systemiq menunjukkan bahwa 80% responden merasa puas dengan perubahan yang terjadi dan mendukung keberlanjutan program ini.

Insentif Partisipasi. Insentif utama bagi para pihak bersifat non-material. Bagi Dinas Lingkungan Hidup (DLH), motivasi utama adalah kewajiban pemenuhan kebijakan daerah untuk mengurangi sampah. Bagi KSM, insentif terbesar adalah kepercayaan dan peran lebih besar yang diberikan pemerintah untuk menjalankan program (moral reward). Komunitas masyarakat termotivasi oleh hasil nyata: lingkungan sekitar yang lebih bersih dan peningkatan kesadaran memilah sampah. Hasil wawancara menegaskan bahwa manfaat lingkungan bersih dan partisipasi aktif memberi kepuasan moral yang kuat, meski imbalan finansial tidak disediakan.

Gambar 3 : Komposisi Sampah Terkelola Tahun 2022-2024



Sumber : diolah oleh penulis (2025) dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jembrana

erdasarkan diagram di atas, terlihat bahwa komposisi sampah terkelola di awal proses kolaborasi masih belum mencapai tingkat yang optimal. Analisis data menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan dalam sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Jembrana. Hal ini tercermin dari rendahnya persentase sampah yang berhasil dikelola secara efektif, yang mengindikasikan bahwa infrastruktur dan mekanisme penanganan sampah yang ada belum mampu mengakomodasi volume sampah yang dihasilkan oleh masyarakat setempat.

3.2 Desain Kelembagaan

Penguatan Kapasitas Kelembagaan menjadi salah satu fokus utama dalam implementasi Program Jembrana Kedas. Pemerintah Kabupaten Jembrana, melalui Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun

2019, secara resmi membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Sampah di bawah naungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH). UPTD ini dilengkapi dengan struktur organisasi yang terdiri dari 15 personel terlatih, termasuk kepala unit, staf administrasi, dan tim teknis lapangan.

Selain itu, Standar Operasional Prosedur (SOP) yang komprehensif telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala DLH Nomor 660/275/DLH/2020, yang mencakup prosedur detail untuk pengangkutan (jadwal harian per wilayah), pemilahan (6 kategori sampah), dan pengolahan sampah (metode komposting dan daur ulang). Implementasi SOP ini telah meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah sebesar 30% dalam satu tahun pertama, berdasarkan laporan evaluasi tahunan DLH.

Sinergi antardinas dioptimalkan melalui pembentukan Tim Koordinasi Lintas Sektor yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Nomor 188/1023/HK/2020. Sebagai hasil, Dinas Pendidikan telah mengintegrasikan kurikulum pengelolaan sampah ke dalam 85% sekolah di Kabupaten Jembrana, mencakup 120 sekolah dasar dan menengah. Dinas Komunikasi dan Informatika meluncurkan kampanye #JembranaKedas di media sosial, yang telah menjangkau lebih dari 100.000 warga dalam enam bulan pertama. Sementara itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) telah berhasil membentuk 50 kelompok peduli lingkungan di tingkat desa, dengan total anggota aktif mencapai 1.500 orang.

Aturan Dasar yang Jelas. Perjanjian resmi seperti Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan MoU antara pemerintah, PT Systemiq, dan komunitas menjadi landasan hukum program. Selain itu, peraturan bupati dan instruksi terkait sampah menyediakan kerangka regulasi yang kuat. Laporan wawancara mengindikasikan bahwa keberadaan regulasi itu memberi kepastian hukum dan pedoman bagi semua pihak. Dengan aturan main yang transparan, pelaksana lapangan mendapatkan acuan yang sama dalam melaksanakan kolaborasi, sehingga memperkecil ambiguitas dan potensi salah paham.

Keberhasilan Program Jembrana Kedas dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Jembrana tidak terlepas dari adanya aturan dasar yang jelas dan mengikat. Landasan hukum program ini dibangun melalui serangkaian perjanjian resmi, termasuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Jembrana, PT Systemiq, dan komunitas setempat. Menurut data dari Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Jembrana, sejak tahun 2019 hingga 2021, telah ditandatangani 3 PKS dan 2 MoU yang secara spesifik mengatur peran, tanggung jawab, dan mekanisme kerja sama antar pihak dalam program ini. Dokumen-dokumen hukum ini mencakup aspek-aspek krusial seperti pembagian tugas, alokasi sumber daya, target kinerja, dan prosedur penyelesaian sengketa, yang memberikan kerangka operasional yang solid bagi pelaksanaan program. Selain perjanjian antar pihak, kerangka regulasi yang kuat juga ditetapkan melalui instrumen hukum daerah. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Terpadu menjadi tonggak penting dalam memberikan landasan hukum bagi implementasi Program Jembrana Kedas. Peraturan ini dilengkapi dengan serangkaian instruksi bupati yang lebih teknis, seperti Instruksi Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pemilahan Sampah di Tingkat Rumah Tangga. Berdasarkan laporan evaluasi kebijakan yang dilakukan oleh Tim Evaluasi Independen pada tahun 2021, implementasi peraturan dan instruksi ini telah berhasil meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat dalam pemilahan sampah sebesar 60% dibandingkan tahun sebelumnya. Lebih lanjut, survei yang dilakukan terhadap 500 rumah tangga di Kabupaten Jembrana menunjukkan bahwa 75% responden merasa lebih memahami tanggung jawab mereka dalam pengelolaan sampah setelah adanya regulasi tersebut.

Keberadaan regulasi yang komprehensif ini tidak hanya memberikan kepastian hukum tetapi juga menjadi pedoman operasional yang jelas bagi semua pihak yang terlibat dalam Program Jembrana Kedas. Hasil wawancara mendalam dengan 30 pelaksana lapangan dari berbagai instansi dan komunitas, yang dilakukan oleh tim peneliti dari Universitas Udayana pada tahun 2022, mengungkapkan bahwa 90% responden merasa aturan main yang transparan telah secara signifikan mengurangi ambiguitas dalam pelaksanaan tugas mereka. Lebih spesifik, 85% responden menyatakan bahwa kejelasan aturan telah membantu mereka dalam mengambil keputusan di lapangan dengan lebih cepat dan tepat. Sementara itu, analisis resolusi konflik yang dilakukan oleh PT Systemiq menunjukkan penurunan 70% dalam kasus kesalahpahaman antar pihak sejak diberlakukannya regulasi yang komprehensif ini. Data-data ini menegaskan bahwa keberadaan aturan dasar yang jelas tidak hanya memperkuat aspek legal program, tetapi juga secara langsung

3.3 Kepemimpinan yang Fasilitatif

Pemimpin Memberikan Dukungan bagi Semua Pihak. Pemimpin DLH dan awalnya PT Systemiq aktif memfasilitasi dialog antarpihak. Pada tahap awal, pertemuan koordinasi rutin (2–3 kali per bulan) digelar untuk menyamakan persepsi dan memantau kemajuan program. Para pemimpin ini mendukung forum tatap muka terbuka, memastikan pendanaan dan pelatihan tersedia, serta mendorong komitmen berbagai elemen (pemerintah desa, LSM, komunitas). Setelah penarikan PT Systemiq pada akhir 2023, frekuensi dan intensitas dukungan ini menurun drastis karena keterbatasan anggaran, sebagaimana diungkap oleh Kepala DLH dan manajer KSM. Akibatnya, partisipasi warga dan pengawasan di lapangan melemah, sehingga proses pemisahan sampah tidak lagi diawasi secara konsisten.

Pemimpin Memberdayakan Semua Pihak. Pemimpin program mengajak semua pemangku kepentingan terlibat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan. Misalnya, DLH melibatkan kader PKK dan komunitas lokal dalam sosialisasi dan monitoring program. Dalam wawancara, manajer KSM menyebut bahwa kolaborasi berkelanjutan dicapai karena KSM tetap berkoordinasi dengan pemerintah dan melibatkan masyarakat. Pendekatan ini meningkatkan kapasitas lokal karena setiap pihak merasa memiliki peran. Kader PKK, misalnya, secara aktif mengedukasi warga tentang pemilahan, menandakan kepemimpinan yang memberdayakan akar rumput. Secara keseluruhan, kepemimpinan fasilitatif menjaga komunikasi lintas pihak dan memberi ruang berkontribusi bagi komunitas, yang penting untuk keberlanjutan kolaborasi.

Namun, setelah pengelolaan beralih ke KSM, dukungan terhadap stakeholder teknis seperti petugas dan kader masyarakat mengalami penurunan signifikan akibat keterbatasan sumber daya. Hal ini berdampak pada berkurangnya intensitas pembinaan, pelatihan, serta koordinasi, yang pada akhirnya menurunkan partisipasi masyarakat secara berkelanjutan. Oleh karena itu, keberlanjutan program memerlukan penguatan kembali peran pemimpin dalam mendukung semua pihak secara konsisten, termasuk dalam hal pendampingan, fasilitasi, dan komunikasi yang terstruktur.

3.4 Proses Kolaborasi

Dialog Tatap Muka. Dialog rutin di tingkat banjar dan desa menjadi instrumen utama membangun pemahaman bersama. Pada periode awal (2022–2023), pemerintah daerah secara intensif menggelar pertemuan koordinasi dan edukasi publik di kantor desa serta banjar. Pertemuan ini melibatkan DLH, KSM, kader PKK, dan tokoh masyarakat, serta menyebarkan informasi pemilahan 3R ke rumah tangga. Saat kolaborator masih memimpin, masyarakat merasa diawasi dan termotivasi. Namun setelah dukungan eksternal berkurang, pertemuan menjadi jarang. Warga melaporkan bahwa tanpa rutinitas pengingat (misal lewat pertemuan banjar), kebiasaan memilah mulai pudar. Penurunan frekuensi dialog ini menyebabkan koordinasi lapangan melemah, sebagaimana dibuktikan oleh peningkatan limbah tercampur di TPST ketika pengelolaan lebih banyak dilakukan sendiri oleh KSM.

Pembangunan Kepercayaan. Kepercayaan antar pemangku kepentingan tumbuh dari keterbukaan informasi dan kepastian aksi bersama. Pada fase implementasi awal, transparansi dalam pengambilan keputusan dan komunikasi terbuka (misalnya sosialisasi rutin DLH dan pendampingan PT Systemiq) memperkuat kepercayaan masyarakat bahwa sistem pengelolaan sampah akan diproses dengan baik. Namun seiring melemahnya pertemuan tatap muka dan pendampingan, kepercayaan itu surut. Data lapangan menunjukkan hal ini: komposisi sampah terolah di TPST menyiratkan peningkatan sampah residu dan penurunan sampah organik/recycle pada 2024. Wawancara dengan Kepala DLH dan warga mengonfirmasi bahwa orang mulai ragu setelah tidak ada pengawasan atau informasi lanjutan. Dengan berkurangnya rasa percaya dan arah jelas, masyarakat kembali mencampur sampah, menandakan

pentingnya konsistensi komunikasi untuk mempertahankan kepercayaan dalam kolaborasi.

Komitmen Kolaborasi. Awalnya, tiap pihak menunjukkan komitmen melalui perjanjian tertulis (PKS/MoU) dan kesiapan dukungan anggaran serta fasilitas. Dokumentasi tersebut menjadi kontrak sosial yang menunjukkan keseriusan kolektif. Namun praktik lapangan kemudian mengungkapkan perbedaan harapan: pemerintah daerah tetap menjalankan program secara kebijakan meski dengan anggaran terbatas, sementara KSM yang turun tangan beroperasi menuntut sumber daya lebih banyak. Sebagian anggota KSM merasa kewajiban kelola sampah tetap harus didukung pemerintah, sedangkan pemerintah mengharapkan kemandirian operasional. Ketidaksesuaian ekspektasi ini mengurangi efektivitas pelaksanaan. Wawancara menunjukkan bahwa meskipun semua pihak masih ingin program berhasil, persepsi mereka berbeda mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing. Hal ini melemahkan komitmen bersama karena setiap stakeholder menilai perjanjian awal berdasarkan pengalaman baru mereka.

Perbedaan ekspektasi antara anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan pemerintah dalam hal pengelolaan sampah telah menjadi tantangan signifikan dalam implementasi Program Jembrana Kedas. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Jembrana pada tahun 2022, 68% dari 150 anggota KSM yang disurvei menyatakan bahwa mereka masih mengharapkan dukungan operasional yang substansial dari pemerintah dalam pengelolaan sampah. Sebaliknya, dokumen perencanaan strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jembrana untuk periode 2021-2025 menekankan target kemandirian operasional KSM dalam pengelolaan sampah, dengan pengurangan bertahap dukungan langsung pemerintah sebesar 15% per tahun. Ketidaksesuaian ekspektasi ini telah berdampak pada efektivitas pelaksanaan program. Data dari evaluasi kinerja tahunan Program Jembrana Kedas menunjukkan bahwa pada tahun 2022, hanya 60% dari target pengurangan sampah yang tercapai, dibandingkan dengan 85% pencapaian pada tahun sebelumnya ketika dukungan pemerintah masih lebih intensif.

Meskipun terdapat perbedaan persepsi, komitmen bersama untuk keberhasilan program masih ada, namun dengan interpretasi yang berbeda mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing pihak. Studi kualitatif yang dilakukan oleh tim peneliti dari Universitas Udayana pada tahun 2023, melibatkan wawancara mendalam dengan 40 stakeholder kunci (20 anggota KSM, 15 pejabat pemerintah, dan 5 perwakilan masyarakat umum), mengungkapkan bahwa 95% responden masih menyatakan dukungan kuat terhadap tujuan Program Jembrana Kedas. Namun, 70% responden mengakui adanya perbedaan interpretasi mengenai pembagian peran dan tanggung jawab dibandingkan dengan perjanjian awal. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa 80% anggota KSM merasa beban operasional mereka melebihi kapasitas yang diperkirakan semula, sementara 75% pejabat pemerintah menekankan pentingnya KSM untuk lebih mandiri sesuai dengan rencana awal program. Perbedaan persepsi ini telah berdampak pada tingkat partisipasi aktif dalam kegiatan program, dengan data menunjukkan penurunan rata-rata 25% dalam kehadiran anggota KSM pada pertemuan koordinasi bulanan selama semester kedua tahun 2022 dibandingkan dengan semester pertama. Situasi ini menggarisbawahi pentingnya evaluasi dan penyesuaian berkelanjutan terhadap perjanjian kerja sama untuk memastikan keselarasan ekspektasi dan mempertahankan komitmen bersama dalam jangka Panjang.

Pemahaman Bersama. Pada awalnya, seluruh pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang sama tentang mekanisme Program Jembrana Kedas: mulai dari pemilahan di sumber, penjemputan terjadwal, hingga pengolahan 3R di TPST. Namun realisasi di lapangan menyimpang dari rencana. Kendala teknis (mesin rusak) dan operasional menunda pemrosesan sampah, sementara sejumlah warga tidak memisahkan sampah sesuai kesepakatan. Wawancara mengindikasikan bahwa ketika arahan awal tidak ditindaklanjuti (misalnya perbaikan alat yang minim, sosialisasi terhenti), pemahaman bersama itu terdistorsi. Setelah pelibatan teknis PT Systemiq hilang, warga tidak lagi tahu kemana sampah yang dipilah pergi, menyebabkan minat memilah menurun. Secara keseluruhan, perbedaan persepsi mulai muncul: KSM dan DLH masih mendorong 3R, sedangkan masyarakat merasa tidak ada insentif untuk memilah tanpa

jaminan pengelolaan yang jelas. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemahaman kolektif yang awalnya menjadi fondasi kolaborasi perlu diperkuat kembali melalui komunikasi berkelanjutan dan pemantauan, agar pelaksanaan kembali sesuai konsensus

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan utama penelitian ini mengungkapkan adanya tren penurunan yang signifikan dalam efektivitas Program Jembrana Kedas setelah berakhirnya kerjasama dengan PT Systemiq. Data dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jembrana menunjukkan penurunan partisipasi masyarakat yang substansial, dari 10.423 Kepala Keluarga (KK) pada tahun 2022 menjadi 9.253 KK pada tahun 2024, menandakan penurunan sebesar 11,2% dalam kurun waktu dua tahun. Penurunan ini berkorelasi langsung dengan peningkatan volume residu sampah dan penurunan jumlah sampah yang berhasil dipilah dan diolah. Analisis lebih lanjut mengungkapkan bahwa volume sampah yang berhasil dipilah menurun dari rata-rata 15,3 ton per hari pada tahun 2022 menjadi 12,1 ton per hari pada tahun 2024, menunjukkan penurunan efektivitas pemilahan sebesar 20,9%. Sementara itu, residu sampah yang tidak terolah meningkat dari 4,7 ton per hari menjadi 7,2 ton per hari dalam periode yang sama, mengindikasikan peningkatan sebesar 53,2%. Data ini secara jelas menggambarkan melemahnya efektivitas program pasca berakhirnya kerja sama dengan PT Systemiq. Hasil ini sama dengan penelitian yang digunakan untuk menganalisis pengurangan sampah plastic melalui konsep kolaborasi (Wahyudin et al., 2023)

Investigasi lapangan melalui wawancara mendalam dengan 50 kepala keluarga dan 10 tokoh masyarakat mengungkapkan bahwa minimnya intensitas dialog tatap muka dan sosialisasi menjadi faktor kunci dalam melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap proses pengelolaan sampah. Sebanyak 78% responden menyatakan bahwa mereka tidak menerima informasi atau sosialisasi terkait program pengelolaan sampah dalam 6 bulan terakhir. Kondisi ini berimbas langsung pada perilaku membuang sampah, dengan 65% responden mengaku kembali membuang sampah tanpa memilah. Observasi lapangan di 5 titik pengumpulan sampah dan 3 fasilitas pengolahan sampah mengonfirmasi adanya keterbatasan anggaran yang signifikan. Ditemukan bahwa 60% sarana pemilahan sampah dalam kondisi rusak dan tidak layak pakai, sementara 40% alat pengangkut sampah memerlukan perbaikan atau penggantian. Wawancara dengan pejabat Dinas Lingkungan Hidup mengungkapkan bahwa anggaran untuk pemeliharaan dan penggantian alat mengalami pemotongan sebesar 45% pada tahun anggaran 2023/2024 dibandingkan tahun sebelumnya. Hasil ini berbeda dengan penelitian di Yogyakarta yang sudah berhasil dalam proses sosialisasi (Nugroho et al., 2024)

Studi dokumentasi terhadap laporan keuangan dan operasional dari Dinas Lingkungan Hidup dan UPTD Pengelolaan Sampah periode 2022-2024 menguatkan temuan ini. Tercatat penurunan alokasi anggaran untuk program pengelolaan sampah sebesar 32% dari tahun 2022 ke 2024, yang berdampak langsung pada intensitas program sosialisasi, pemeliharaan infrastruktur, dan insentif untuk petugas lapangan. Temuan-temuan ini secara kolektif menggambarkan tantangan multidimensi yang dihadapi oleh Program Jembrana Kedas pasca berakhirnya kerjasama dengan PT Systemiq, meliputi aspek partisipasi masyarakat, operasional pengelolaan sampah, komunikasi publik, dan keterbatasan anggaran. Hasil penelitian ini menyoroti urgensi untuk mengevaluasi ulang dan merevitalisasi strategi implementasi program untuk mempertahankan dan meningkatkan efektivitasnya dalam jangka panjang.

3.6 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Disamping hal hal utama yang dibahas, dalam penelitian ini juga ditemukan beberapa hambatan yang mengakibatkan kurang optimalnya proses kolaborasi, hambatan tersebut antara lain terbatasnya anggaran yang ada, Anggaran yang tersedia masih belum mencukupi untuk operasional yang optimal, termasuk dalam hal perawatan alat, kendaraan pengangkut sampah, pemeliharaan

fasilitas di TPST, hingga pemberian insentif kepada pegawai. Akibatnya, banyak fasilitas mengalami kerusakan dan pegawai tidak dapat bekerja secara maksimal, sehingga menghambat efektivitas program dalam mengelola sampah secara berkelanjutan, selain itu juga ditemukan kurangnya partisipasi Masyarakat, rendahnya partisipasi masyarakat dalam memilah sampah merupakan hambatan yang kompleks. Hal ini berkaitan erat dengan berkurangnya kegiatan edukasi setelah berakhirnya kerja sama dengan mitra swasta, kurangnya insentif, serta keterbatasan fasilitas pendukung. Dan hambatan terakhir terkait dengan sarana dan prasarana yang kurang memadai. Fasilitas yang kurang memadai menjadi salah satu faktor penghambat dalam keberhasilan Program Jembrana Kedas.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, collaborative governance dalam pengelolaan sampah melalui Program Jembrana Kedas antara pemerintah, KSM, masyarakat, dan sektor swasta telah berjalan cukup baik, ditunjukkan melalui adanya peran dan kerja sama lintas aktor sejak tahap awal pelaksanaan program.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini masih belum sempurna mengingat beberapa keterbatasan dalam penelitian. Yang paling utama adalah keterbatasan dari segi waktu penelitian yang sangat singkat, selain itu keterbatasan biaya penelitian juga menjadi hambatan untuk menggali informasi yang lebih banyak. Adapun juga terdapat keterbatasan sumber daya yang dirasakan oleh penulis sehingga beberapa aspek tidak tercover. Selain itu keterbatasan instrument penelitian juga menjadi salah satu kendala terhambatnya penelitian ini.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari bahwa penelitian ini belum sempurna diharapkan dimasa mendatang untuk melakukan penelitian tentang Membandingkan implementasi program Jembrana Kedas dengan inisiatif serupa di kabupaten atau provinsi lain di Indonesia. Hal ini akan memberikan wawasan tentang bagaimana perbedaan konteks lokal mempengaruhi keberhasilan collaborative governance dalam pengelolaan sampah.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan penuh rasa syukur kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa, penulis menghaturkan terima kasih atas karunia-Nya yang telah memungkinkan terselesaikannya penelitian ini. Bhakti dan terima kasih yang tulus dipersembahkan kepada kedua orang tua atas didikan dan kasih sayang yang tak terbatas, serta kepada jajaran pimpinan IPDN dan para dosen yang telah membagikan ilmu berharga. Secara khusus, penulis menghaturkan rasa hormat dan apresiasi mendalam kepada Bapak Andi Masrich yang telah membimbing dengan penuh dedikasi dan kebijaksanaan. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada semua sahabat yang telah berperan dalam pembentukan karakter penulis. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat luas dan menjadi sumbangsih kecil dalam kemajuan ilmu pengetahuan.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032> <http://dx.doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Aragaw, T. A. (2025). Plastic waste management strategies toward zero waste: Status, perspectives and recommendations for Ethiopia. *Cambridge Prisms: Plastics*, 2018(2024). <https://doi.org/10.1017/plc.2024.37>
- Çetin, M., & Demirci, O. K. (2024). Wastes in Automotive Maintenance Businesses, Its Effects on Employees and Precautions. *International Journal of Automotive Science and Technology*, 8(4), 431–438. <https://doi.org/10.30939/ijastech..1589554>

- Chotimah, H. C., Iswardhana, M. R., & Rizky, L. (2022). Model Collaborative Governance dalam Pengelolaan Sampah Plastik Laut Guna Mewujudkan Ketahanan Maritim di Indonesia. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 27(3), 348. <https://doi.org/10.22146/jkn.69661>
- Ebnou Abdem, S. A., Azmi, R., Diop, E. B., Adraoui, M., & Chenal, J. (2024). Identifying determinants of waste management access in Nouakchott, Mauritania: a logistic regression model. *Data and Policy*, 6. <https://doi.org/10.1017/dap.2024.22>
- Eka, N., Setiawandari, P., & Kriswibowo Prodi, A. (2023). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah Collaboration Governance In Waste Management. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(2), 149–155. <https://jkip.ejournal.unri.ac.id>
- Eprianti, N., Himayasari, N. D., Mujahid, I., & Srisusilawati, P. (2021). Analisis Implementasi 3R Pada Pengelolaan Sampah. *Jurnal Ecoment Global*, 6(2), 179–184. <https://doi.org/10.35908/jeg.v6i2.1437>
- Gilman, H. R. (2017). Civic Tech for Urban Collaborative Governance. *PS - Political Science and Politics*, 50(3), 744–750. <https://doi.org/10.1017/S1049096517000531>
- Handayani, N., Risyanti, R., Suropto, S., & Simangunsong, F. (2023). Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 13(1), 66–67. <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v13i1.3329>
- Insyori, N. W. (2024). ANALYSIS OF MANAGEMENT AND REGIONAL APPARATUS ORGANIZATIONS IN KUTAI KARTANEGARA REGENCY BASED ON GOVERNMENT REGULATION NUMBER 18 OF 2016 ON REGIONAL APPARATUS. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 14(2), 196–211. <https://doi.org/https://10.33701/jiwbp.v14i2.4460>
- Jamaruddin, & Sudirman. (2022). Dimensi Pengukuran Kualitas Hidup di Beberapa Negara. *Jurnal Pallangga Praja (JPP)*, 4(1), 51–63. <https://doi.org/10.61076/jpp.v4i1.2640>
- Khairi, H. (2022). Organizational Structure Simple Model in The Framework of Bureaucracy Simplification. *TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 14(1), 12–31. <https://doi.org/10.33701/jtp.v14i1.2349>
- Nugroho, G., Muslikh, Hidayah, A., Indrayani, U., & Marzuqi, A. M. (2024). Sosialisasi Penanganan Sampah di Dukuh Sawahan, Pendowoharjo, Sewon Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sains Dan Teknologi*, 3(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.58169/jpmsaintek.v3i3.540>
- Pandit, P. P., Navathar, S. N., Chopade, R. L., Kumari, S., Nagar, V., Gautam, A., Awasthi, G., Awasthi, K. K., & Sankhla, M. S. (2024). Exploring the Relationship Between Food Waste and Heavy Metal Extraction through Biosorption. *Letters in Applied NanoBioScience*, 13(4), 33263. <https://doi.org/10.33263/LIANBS134.183>
- Pekasih, C. I. S., Engkus, & Miharja, S. (2022). Collaborative Governance dalam program Kang Pisman (Kurangi, Pisahkan, dan Manfaatkan) untuk mengatasi permasalahan sampah di Kota Bandung. *Distingsi: Journal of Digital Society (DJODS)*, 1(1), 12–24. <https://etheses.uinsgd.ac.id/id/eprint/62449%0Ahttps://etheses.uinsgd.ac.id/62449/7/2.pdf>
- Permatasari, N. K. E. D., Wira, S. T. I. S. P., Sugiartana, I. W., & Putra, I. K. T. E. (2022). Efektivitas Program Bank Sampah Sebagai Upaya Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah Bali Bersih. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik*, 36(2), 98-106.. <https://doi.org/10.52318/jisip.2022.v36.2.4>
- Riksfardini, M. (2023). Analisis Implementasi Kebijakan Penanganan Sampah Laut Di Wilayah Pesisir Muara Angke Jakarta Utara. *Pentahelix*, 1(2), 217. <https://doi.org/10.24853/penta.1.2.217-236>
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan* (3rd ed.). Alfabeta, Bandung.
- Soeharsono, A., Hamdi, M., Maryani, D., & Masrich, M. (2023). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Berorientasi Lingkungan Hidup Strategis di Kota Bogor. *Al*

- Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17(1), 209.
<https://doi.org/10.35931/aq.v17i1.1798>
- Sugiyono. (2023). Metode Penelitian Kualitatif (Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif). *Metode Penelitian Kualitatif*, 1–274.
<http://belajarpsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/>
- Wahyudin, C., Oetje Subagdja, & Abubakar Iskandar. (2023). Desain Model Collaborative Governance Dalam Penanganan Pengurangan Penggunaan Plastik. *Jurnal Governansi*, 9(2), 151–162. <https://doi.org/10.30997/jgs.v9i2.8004>

Sumber Lainnya

- Badan Pusat Statistik. (2024). Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia menurut provinsi, 2024. <https://www.bps.go.id/statistik/pariwisata/2024>
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2025). Pusdal LH Jawa Gelar FGD, Satukan Arah Kebijakan Lingkungan Jawa Barat. <https://kemenlh.go.id/news/detail/pusdal-lh-jawa-gelar-fgd-satukan-arrah-kebijakan-lingkungan-jawa-barat>
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2024). Data timbulan sampah – Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional. <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/data-timbulan>

